

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah Atas BPHTB” yang dalam penulisannya menggunakan metode Penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Dalam Pelaksanaan penentuan penetapan besaran BPHTB tersebut terdapat permasalahan yang timbul dikarenakan sesuai perundang-undangan adalah transaksi namun oleh petugas pemungutan BPHTB ditentukan menggunakan harga pasar, zonasi atau lainnya sesuai dengan subyektifitas petugas pemungut, sehingga memunculkan ketidak pastian hukum. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara negosiasi antara wajib pajak dengan petugas pajak, Khususnya di daerah Sidoarjo belum pernah terjadi permasalahan BPHTB tersebut menjadi sengketa di pengadilan pajak.

Kata Kunci : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Sengketa Pajak Daerah, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This thesis is entitled "Legal Certainty in Settling Regional Tax Disputes over BPHTB in Sidoarjo" which in its writing uses the doctrinal research method with the statutory approach and conceptual approach. Land and Building Right Acquisition Fees are one of the biggest contributors to the Regional Own Revenue. This acquisition fee for land and building rights is regulated in Act Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies in conjunction with Regional Regulation No. 5 of 2010 concerning the acquisition fee for land and building rights. In the implementation of determining the amount of the BPHTB there are problems that arise because according to the law is an estimate but by the BPHTB collection officer is determined using market prices, zoning or other in accordance with the collecting officer subjectivity, thus raising legal uncertainty. These problems can be resolved by negotiating between taxpayers and revenue officer, especially in the Sidoarjo area. The problem of BPHTB has never been a dispute in the tax court.

Keywords: Acquisition of Land and Building Rights Fees, Regional Tax Disputes, Dispute Resolution